

# Implementasi Fungsi Pokok *Public Relations* dalam Website Kementerian Republik Indonesia

Arnold Rezon, Titi Nur Vidyarini, Vita Monica, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Petra Surabaya

*arnoldrezon@gmail.com*

## Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi dari fungsi pokok Public Relations dalam Website Kementerian Republik Indonesia. Rosady Ruslan merumuskan 5 indikator yang menjadi fungsi pokok Public Relations dalam Website Kementerian Republik Indonesia. 5 indikator tersebut adalah kebijaksanaan pemerintah, memberi pelayanan, menyebarkan informasi mengenai program – program kerja, mediator dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah dan masyarakat, serta berperan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi stabilitas nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis isi dengan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini, peneliti melihat bahwa fungsi yang paling banyak terimplementasi adalah fungsi pelayanan dan informasi program kerja.

**Kata Kunci:** *Government Public Relations, Analisis Isi, Kementerian Republik Indonesia, E-Government*

## Pendahuluan

Setiap organisasi tentunya ingin agar keberadaan mereka dapat diterima dan didukung oleh lingkungan mereka. Lingkungan organisasi dalam hal ini merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau publik dari organisasi itu sendiri. Oleh sebab itu, organisasi membutuhkan sesuatu yang dapat menjadi penunjang untuk memudahkan publik dalam memberikan dukungan serta melakukan penerimaan terhadap organisasi. Anggraini dan Rochayanti (2008) menyatakan seiring dengan perkembangan teknologi yang terjadi itulah menjadikan pola pikir masyarakat pun semakin berkembang dan perilaku masyarakat menjadi lebih kritis bahkan dapat menyebabkan perubahan yang sangat cepat di masyarakat.

Fenomena global itu membawa konsekuensi pada pengakuan terhadap hak atas informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia (Indrajid, 2005). Perangkat perundang-undangan di bidang informasi, komunikasi dan media massa juga semakin menjamin hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, sehingga pemerintah berkewajiban untuk menyampaikan informasi

publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, sejalan dengan pengembangan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tidak terkecuali dengan pemerintah Indonesia, pemerintah Indonesia mendorong pemanfaatan media baru tersebut melalui Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government yang mengamanatkan setiap lembaga negara untuk membangun website guna mengembangkan E-Government. Pembangunan e-government di setiap lembaga diarahkan untuk mencapai tujuan:

- a. Membangun jaringan informasi guna mendukung pelayanan publik dengan kualitas memuaskan, dapat diakses masyarakat luas, serta dengan biaya yang terjangkau;
- b. Mendorong kerjasama antar lembaga pemerintah dan swasta secara interaktif untuk meningkatkan perekonomian nasional;
- c. Membentuk mekanisme dan saluran komunikasi antar lembaga pemerintah dengan publik;
- d. Membentuk sistem manajemen dan proses kerja yang lancar, transparan dan efisien antar lembaga pemerintah. (Presiden Republik Indonesia, 2003)

Keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Lembaga negara semakin terlihat dengan kehadiran Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Tentunya beberapa payung hukum baru yang muncul tersebut mengacu pada dasar hukum Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 F ayat 2, yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. (Kemenkominfo, 2003)

Website adalah satu dari sekian banyak media informasi yang digunakan dalam dunia internet. Saat ini, website digunakan oleh perusahaan, universitas, sekolah, individu, kelompok, dan lain sebagainya. Setiap institusi tersebut menggunakan website untuk berbagai keperluan demi mencapai tujuannya. Keperluan itu adalah komunikasi bisnis, riset bisnis, pengembangan jaringan pemasaran online, perekrutan tenaga kerja hingga layanan online untuk publik (Nuryanto, 2007). Untuk mencapai hasil yang maksimal, setiap website perlu memiliki kualitas yang baik.

Website yang telah dibangun dengan tujuan memberikan layanan standar kepada publik juga dapat menyampaikan berbagai hal yang menjadi kebutuhan masyarakat yang kian meningkat. Dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan meningkatnya rasa hak untuk tahu (right to know), publik berharap pemerintah sebagai pihak yang mendapat kepercayaan rakyat untuk mengelola negara lebih terbuka dalam

memberikan informasi. Di sinilah peran praktisi publik relations (practitioner of publik relations) sangat diperlukan keberadaannya.

Teknologi informasi dan komunikasi yang kian maju didorong untuk mengoptimalkan peran publik relations melalui digitalpublik relations berbasis web. Rumusan World Bank tentang E-Government mengacu pada penggunaan teknologi informasi (seperti Wide Area Network, internet, dan mobile computing) oleh instansi pemerintah yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan badan lain dari pemerintah (Puji Lestari dkk, 2015). Sementara United Nation Development Program (UNDP), sebagaimana dikutip Emil A. Lagut menyatakan good governance adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta demi terwujudnya kesejahteraan sosial (Susanto, 2010).

Sebagai salah satu alat PR Kemenkominfo belum memasukan pengimplementasian fungsi PR pemerintah sebagai salah satu indikator penilaian website lembaga pemerintahan. Padahal fungsi pokok PR pemerintah mencakup beberapa hal penting yang seharusnya diterapkan dalam website pemerintahan. Menurut Rosady Ruslan (2007), fungsi pokok PR pemerintah Indonesia pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengamankan kebijaksanaan pemerintah.
- b. Memberikan pelayanan, dan menyebarluaskan pesan atau informasi mengenai kebijaksanaan dan program – program kerja secara nasional kepada masyarakat.
- c. Menjadi komunikator dan sekaligus sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi, serta memperhatikan keinginan- keinginan publiknya di lain pihak
- d. Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka Panjang.

Berdasarkan Statshow (2019) rata-rata kunjungan ke website milik Kementerian di Indonesia berjumlah 13.586 pengunjung per hari. Pengunjung yang cukup banyak tersebut menunjukkan betapa besar partisipasi masyarakat untuk menggunakan website milik Kementerian di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus selalu melakukan pembenahan terhadap website milik Kementerian di Indonesia. Penelitian terkait bagaimana implementasi fungsi pokok PR pemerintah di website Kementerian Republik Indonesia jadi penting untuk dilakukan. Hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pemerintah untuk mengembangkan website menjadi lebih baik lagi sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan website milik Kementerian di Indonesia, dan tujuan Inpres untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang murah dan mudah diakses bisa tercapai.

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Veravinna Handoko dari Universitas Kristen Petra pada tahun 2009 dengan judul Implementasi Fungsi publik relations Pada Situs Departemen Perindustrian Dan Departemen Pertanian. Pada penelitian ini, peneliti melihat implementasi fungsi publik relations situs departemen pemerintah dengan membandingkan website Departemen Perindustrian dan Departemen Pertanian. Hasil penelitian ini adalah 58% penerapan fungsi publik relations untuk Departemen Pertanian dan 51% untuk Departemen Perindustrian. Penelitian ini sama-sama menggunakan media website dan menggunakan metode analisis isi. Namun, pada penelitian Implementasi Fungsi publik relations Pada Situs Departemen Perindustrian dan Departemen Pertanian objek penelitiannya adalah Departemen Perindustrian dan Departemen Pertanian sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah pada website seluruh Kementerian Republik Indonesia. Penelitian akan Kementerian Republik Indonesia ini juga ingin melihat bagaimana fungsi pokok publik relations pemerintahan pada website Kementerian Republik Indonesia.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Waskito Ardi Nugrohodari Universitas Lampung pada tahun 2017 dengan judul Analisis Pengelolaan Website Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Promosi Pariwisata Melalui Internet. Pada penelitian ini, peneliti melihat pengelolaan website Pemerintah Provinsi Lampung dalam promosi pariwisata melalui internet. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa website resmi Pemerintah Provinsi Lampung yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi tidak efektif dalam melakukan promosi pariwisata Provinsi Lampung karena tidak memuat informasi secara lengkap dan rinci hanya berupa berita singkat. Selain itu, ada pula jurnal oleh Edwi Arief Sosiawandari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta dengan judul Evaluasi Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Daerah di Indonesia: Perspektif Content dan Manajemen. Jurnal ini memfokuskan pada website pemerintah daerah.

Dari latar belakang yang telah disebutkan, untuk mempertahankan dan menambah jumlah pengunjung tersebut, pengunjung perlu merasa puas dengan website tersebut. Kualitas konten website memiliki pengaruh terhadap kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat juga merupakan salah satu elemen agar tujuan dari instruksi presiden tersebut dapat tercapai. Oleh karena itu, penelitian Penerapan fungsi PR pemerintah pada website Kementerian Republik Indonesia perlu dilakukan terhadap website milik Kementerian di Indonesia.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Fungsi Pokok PR Pemerintah Indonesia**

Menurut Rosady Ruslan (2007), fungsi pokok PR pemerintah Indonesia pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengamankan kebijaksanaan pemerintah.
- b. Memberikan pelayanan, dan menyebarluaskan pesan atau informasi mengenai kebijaksanaan dan program – program kerja secara nasional kepada masyarakat.
- c. Menjadi komunikator dan sekaligus sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi, serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya di lain pihak
- d. Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka Panjang.

Yang disebut mengamankan kebijaksanaan pemerintah adalah memastikan kebijaksanaan pemerintah diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat. Ini bisa dilakukan dengan membina pengertian pada publik terhadap kebijaksanaan pemerintah baik kepada publik intern maupun ekstern (Widjaja, 1997)

Memberikan penerangan dan Pendidikan kepada masyarakat tentang kebijakan, langkah – langkah, dan tindakan – tindakan pemerintah, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa informasi yang diperlukan secara terbuka, jujur dan objektif (Rachmadi, 1992).

Pelayanan oleh Lembaga Administrasi Negara (1998) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang – undangan.

Pelayanan publik sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik

Dari beberapa pengertian pelayanan publik yang diuraikan tersebut, maka pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan.

Menurut John D. Millet (1954) dalam *Management in Publik Service the Quest for Effective Performance*, PR pemerintah harus memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga/instansi pemerintahan yang bersangkutan. Poin ini sejalan dengan fungsi pertama.

Menjadi komunikator dan sekaligus sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi, serta memperhatikan keinginan- keinginan publiknya di lain pihak berarti PR menjadi penghubung antara pemerintah dan publik. PR harus mengamati, mempelajari dan mengumpulkan data tentang hasrat, keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat dari berbagai sumber. Di sisi lain, PR juga

memberikan nasihat atau saran untuk menanggapi apa sebaiknya yang dilakukan oleh pemerintah seperti yang dikehendaki oleh publiknya (Millet,1954)

Memonitor pendapat umum tentang kebijakan pemerintah, selanjutnya menyampaikan tanggapan masyarakat dalam bentuk feedback kepada pimpinan instansi-instansi pemerintahan yang bersangkutan sebagai input (Rachmadi, 1992, p. 78)

## Metode

### Konseptualisasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian analisis isi deskriptif. Dalam Eriyanto (2011) analisis isi deskriptif adalah analisis isi yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail suatu pesan, atau suatu teks tertentu. Desain analisis ini tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis tertentu atau menguji hubungan di antara variabel. Analisis isi semata untuk deskripsi, menggambarkan aspek – aspek dan karakteristik dari suatu pesan. Peneliti menggunakan teori fungsi pokok PR pemerintah di Indonesia sebagai indicator di penelitian ini.

### Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah website Kementerian Republik Indonesia. Sedangkan objek penelitiannya adalah penerapan fungsi pokok PR pemerintah.

### Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sebagai metode yang sistematis analisis isi mengikuti suatu proses - proses tertentu dalam pengaplikasiannya.

## Temuan Data

Kementerian	Memberi Pelayanan	Kebijaksanaan Pemerintah	Informasi Program Kerja	Mediator	Stabilitas Nasional	
Kementerian Dalam Negeri	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Luar Negeri	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Pertahanan	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Hukum dan HAM	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Keuangan	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Energi dan SDM	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Perindustrian	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Perdagangan	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Pertanian	v	v	v	v	x	80%

Kementerian LH dan Kehutanan	v	v	v	x	v	80%
Kementerian Perhubungan	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Kelautan dan Perikanan	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Ketenagakerjaan	v	v	v	v	v	100%
Kementerian PU dan Perura	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Kesehatan	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Dikbud	v	v	v	x	v	80%
Kementerian Ristekdikti	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Sosial	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Agama	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Kominfo	v	v	v	v	v	100%
Kementerian DPDTT	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Agraria	v	v	v	v	x	80%
Kementerian Sekretaris Negara	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Koperasi dan UKM	v	v	v	x	v	80%
Kementerian PPPA	v	v	v	v	v	100%
Kementerian PAN dan RB	v	v	v	x	v	80%
Kementerian PPN / Bappenas	v	v	v	v	v	100%
Kementerian BUMN	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Pora	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Pariwisata	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Bidang Polhukam	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Bidang Perekonomian	v	v	v	x	v	80%
Kementerian Bidang PMK	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Bidang KSD	v	v	v	v	v	100%
	100%	97%	100%	82%	94%	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa fungsi pelayanan (100%) dan informasi program kerja (100%) keduanya mencapai 100%. Sedangkan fungsi mengamankan kebijaksanaan mencapai 97%. Menjaga stabilitas nasional mencapai 94% dan mediator mencapai 82%. Berarti, dari lima fungsi pokok PR pemerintah, fungsi pelayanan dan fungsi informasi program kerja merupakan fungsi pokok yang dijalankan oleh seluruh Kementerian di *website* nya.

Untuk humas pemerintah sendiri memiliki fungsi pokok menurut Rosady Ruslan (2007) yaitu mengamankan kebijaksanaan pemerintah, memberi pelayanan, menyebarkan informasi mengenai program – program kerja, mediator dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah dan masyarakat, serta berperan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi stabilitas nasional (Ruslan, 2007). Dengan ditetapkannya tujuan, tugas, dan fungsi secara jelas dan terarah maka mempermudah tercapainya tujuan, tugas dan fungsi Kementerian. Selain itu juga menghindari terjadinya tumpah – tindih fungsi dan tugas yang dilaksanakan antar Kementerian.

Kementerian	Headline	Brief	Informasi	Grafis	Sederhana	Link Aktif
-------------	----------	-------	-----------	--------	-----------	------------

Kementerian Dalam Negeri	v	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Luar Negeri	v	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Pertahanan	v	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Hukum dan HAM	v	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Keuangan	v	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Energi dan SDM	v	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Perindustrian	v	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Perdagangan	v	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Pertanian	v	v	v	v	v	v	100%
Kementerian LH dan Kehutanan	v	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Perhubungan	v	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Kelautan dan Perikanan	v	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Ketenagakerjaan	v	v	v	v	v	v	100%
Kementerian PU dan Perura	v	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Kesehatan	v	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Dikbud	v	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Ristekdikti	v	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Sosial	v	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Agama	v	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Kominfo	v	v	v	v	v	v	100%
Kementerian DPDTT	v	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Agraria	v	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Sekretaris Negara	v	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Koperasi dan UKM	v	v	v	v	v	v	100%
Kementerian PPPA	v	v	v	v	v	v	100%
Kementerian PAN dan RB	v	v	v	v	v	v	100%
Kementerian PPN / Bappenas	v	v	v	v	v	v	100%
Kementerian BUMN	v	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Pora	v	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Pariwisata	v	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Bidang Polhukam	v	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Bidang Perekonomian	v	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Bidang PMK	v	v	v	v	v	v	100%
Kementerian Bidang KSD	v	v	v	v	v	v	100%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



## Analisis dan Interpretasi

Dari tabel data di atas 27 dari 34 website Kementerian yang diteliti sudah menerapkan 100% fungsi pokok PR pemerintah Indonesia. Sedangkan 7 diantara 34 sudah menerapkan 80% fungsi pokok PR pemerintah Indonesia.

Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas Kementerian Indonesia sudah menyadari pentingnya fungsi pokok PR pemerintah Indonesia diterapkan pada media komunikasi resmi mereka yaitu website. Website dalam hal ini dapat dimanfaatkan sebagai media publikasi berupa berita-berita terkini seputar berbagai kegiatan dan informasi seputar pemerintahan. Jika sebuah website diberdayakan secara optimal, maka akan menjadi salah satu aspek pertimbangan penting untuk membangun image dan reputasi Kementerian yang nantinya dapat berdampak pula pada reputasi pemerintahan pusat. Karena Kementerian merupakan bagian dari pemerintah pusat. Sehingga dalam pengelolaan media komunikasi website, seorang PR Pemerintah perlu memperhatikan kelengkapan informasi, kemudahan akses dan kecanggihan fitur nya. Hal ini akan mendukung tingkat kepuasan masyarakat akan pelayanan publik yang diberikan oleh institusi pemerintah.

## Simpulan

Keberadaan PR dalam lembaga pemerintah merupakan keharusan untuk memperlancar jalannya interaksi dan penyebaran informasi mengenai publikasi pembangunan nasional. Humas pemerintah sendiri memiliki fungsi pokok yang digunakan sebagai indikator dari penelitian ini yaitu mengamankan kebijaksanaan pemerintah, memberi pelayanan, menyebarkan informasi mengenai program – program kerja, mediator dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah dan masyarakat, serta berperan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi stabilitas nasional.

Pada penelitian ini, fungsi pokok Kementerian dikaitkan dengan media komunikasi resmi Kementerian yaitu website. Website menjadi pilihan yang tepat karena karakteristik website dan internet yang cepat, mudah, dan dapat ditentukan sendiri preferensi tampilan menu sesuai dengan kebutuhan Kementerian. Disini, elemen-elemen pada website yang diamati berupa: Headlines, Brief, Informasi, Grafis, Tampilan dan Link Aktif.

Penelitian ini melihat diterapkannya indikator fungsi pokok PR pemerintah dan website yang baik pada homepage dan menu bar website 34 Kementerian Indonesia. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah, dinilai dari elemen – elemen website yang diamati 34 Kementerian telah menerapkan website yang baik. Sedangkan untuk fungsi pokok PR pemerintah, fungsi yang paling banyak terimplementasi adalah fungsi pelayanan (100%) dan informasi program kerja (100%) keduanya mencapai 100%. Sedangkan fungsi mengamankan kebijaksanaan mencapai 97%. Menjaga stabilitas nasional mencapai 94% dan mediator mencapai 82%. Berarti, dari lima fungsi pokok PR pemerintah, fungsi

pelayanan dan fungsi informasi program kerja merupakan fungsi pokok yang dijalankan oleh seluruh Kementerian di website nya.

## Daftar Referensi

- Cutlip, S., Center, A., & Broom, G. (2011). *Effective Publik Relations*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Grunig, J. (2001). *The Role of Publik Relations in Management and Its Contributions to Organizational and Societal Effectiveness*. Maryland: University of Maryland.
- Herdiyanto. (2013). *Modul perkembangan teknologi komunikasi*. Jakarta: Mercubuana Pers.
- Indrajit, & Zainudin. (2005). *E-Government in Action, ragam kasus implementasi sukses di berbagai belahan dunia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Jaya, S. (2013). Implementasi dan Perkembangan E-Government Di Indonesia. *Jurnal Informatika Multimedia (JIM) STIMED Nusa Palapa*. 37-52.
- Kemenkominfo. (2003). Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga. .
- KEMKOMINFO RI. (2019, January 20). *Pemeringkatan E-Goverment Indonesia (PeGI)*. Retrieved from <https://pegi.layanan.go.id/>
- Kemp, S. (2017, January 24). *Special Reports: We Are Social*. Retrieved from We Are Social: <https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview>
- Kriyantono, R. (2012). *PR writing: Teknik produksi media publik relations dan publisitas korporat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kumorotomo, W. (2019, January 19). *Kegagalan Penerapan E-Government dan Kegiatan Tidak Produktif Dengan Internet*. Retrieved from <http://kumoro.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2009/01/kegagalanpenerapan-egov.pdf>
- Nuryanto, A. (2007). Analisis Peluang Kerja Bidang Teknik Mesin Pada Bursa Kerja Online. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, 165-186.
- Prayudi. (Yogyakarta). *Penulisan naskah publik relations*. 2007: Penerbit Andi.
- Presiden Republik Indonesia. (2003). Intruksi Presiden Nomer 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan E-Goverment. 6-7.
- Ruslan, R. (2007). *Manajemen publik relations dan media komunikasi : Konsepsi dan aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sinaga, E. S. (2014). Implementasi Instruksi Presiden No.3 tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic Government Di Kabupaten Semarang. *Journal of Publik Policy and Management Review*, 1-9.
- Statshow. (2019, February 24). *Statshow Website Report*. Retrieved from Statshow Website Report: <http://www.statshow.com/>.
- Suhandang, D. K. (2004). *Publik Relations Perusahaan: Kajian, Program, dan Implementasi*. Bandung: Penerbit Nuansa.

Theaker, A. (2004). *The Publik Relations Handbook*. Great Britain: Florence Production Ltd.

Werner J, S., & James W, T. (2009). *Teori Komunikasi: sejarah, metode, & terapan di dalam media massa*. Jakarta: Kencana.

Widiartanto, Y. (2016, October 24). *Tekno Kompas*. Retrieved from Kompas.com:  
<https://tekno.kompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna.internet.di.indonesia.capai.132.juta>.

Widjaja, H. (2008). *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara.

Yuhfizar. (2009). *Cara mudah membangun website interaktif menggunakan content managemen system joomla (CMS)*. Jakarta: Elex Media Computindo.